

BAB II

KEMITRAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PRODUKSI PADI

Abdul Waries Patiwiri

Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia/PERPADI

1. PENDAHULUAN

Hingga saat ini beras masih merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia sehingga tetap memegang peranan penting dalam perekonomian nasional terlebih lagi bagi perekonomian rakyat kecil baik yang berada di perdesaan maupun di perkotaan. Mengingat peran yang dimainkan oleh beras sangat besar, maka berbagai upaya perlu dilakukan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kuantitas/ketersediaannya dengan jumlah cukup, kualitas baik, terdistribusi secara merata, dan tingkat harga yang wajar dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk namun fluktuasi harganya tetap terkendali.

Atas pemikiran di atas, keseluruhan sistim agribisnis perberasan perlu dibina dan dikembangkan secara baik dan perlu terintegrasi secara utuh. Dari sisi produksi padi maupun ketersediaan beras, pemberlakuan pelarangan impor beras yang telah berjalan dua tahun setidaknya telah membuktikan bahwa Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri sepanjang tahun, dan secara simultan diikuti pula dengan pendistribusian beras yang semakin merata dan rasional melalui dinamisasi perdagangan beras antar wilayah/pulau. Dari aspek panen/pasca panen dan pengolahan gabah/beras harus diakui bahwa Indonesia belum mampu melepaskan diri dari kondisi inefisiensi yang ditunjukkan dengan

tingkat kehilangan hasil yang masih cukup tinggi serta belum terpenuhinya kebutuhan akan kualitas/jenis beras tertentu sehingga importasi jenis beras tersebut tidak dapat dihindarkan.

Dalam konteks ini, salah satu pelaku yang peranannya sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan adalah petani. Pada perspektif ketahanan pangan, petani memiliki posisi yang strategis sekaligus dilematis. Sebagai produsen padi, petani menentukan ketersediaan pangan sehingga senantiasa dituntut untuk terus meningkatkan produksi. Pada sisi lain petani adalah konsumen yang umumnya adalah penduduk miskin. Situasi seperti ini menyebabkan berbagai kebijakan yang ditempuh untuk memperbaiki nasib petani seringkali justru melemahkan petani itu sendiri. Hal ini terjadi karena petani berada dalam posisi tawar yang rendah. Di samping itu, integrasi agribisnis padi mulai dari penyediaan sarana produksi sampai ke meja makan konsumen masih sangat jauh dari harapan.

Apabila ditelusuri hubungan petani dengan komponen lain dalam agribisnis padi, maka masalah yang senantiasa timbul paling tidak bersumber dari tiga hal, yakni: (a) masih sulitnya petani memperoleh sarana input secara tepat, masih terbatasnya akan jaminan harga dan pasar bagi hasil produksinya dan (c) terbatasnya sumber pendapatan petani di luar usahatani padi. Secara simultan dan jangka panjang apabila masalah ini tidak diatasi maka akan menjadi ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan nasional.

Masalah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasinya karena adanya kendala-kendala yang dimiliki petani yaitu rendahnya pengetahuan petani serta kurangnya insentif sehingga generasi muda petani enggan melakukan kegiatan pertanian khususnya komoditi padi. Kondisi ini akan semakin rumit apabila dikaitkan dengan karakteristik komoditas beras yang memiliki fluktuasi harga yang cukup tajam.

Kompleksitas masalah peningkatan kualitas dan kuantitas tersebut tidak terlepas dari banyaknya sektor dan pelaku yang terkait dalam menangani masalah ini. Masalah kuantitas dan kualitas beras terkait dengan input, budidaya, penanganan pasca panen; dan pasar beras. Masalah ketiadaan alternatif usaha terkait dengan keterbatasan sumberdaya (*man, money, machine, material, method, market*) yang pada dasarnya dapat diatasi bila terjalin kerjasama diantara petani dengan berbagai pihak yang memiliki sumberdaya tersebut. Untuk itu hal yang sangat mendesak adalah interaksi dalam bingkai kemitraan antar pelaku dan sektor terkait.

Oleh sebab itu, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan agroindustri padi/beras selama tahun 2006 - 2010 harus mengarah pada peningkatan kualitas dan rendemen gabah/beras melalui

pengembangan pola kemitraan berbasis kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku demi terwujudnya kesejahteraan dan keberpihakan pada petani dan masyarakat berpenghasilan rendah khususnya.

2. PERMASALAHAN PRODUKSI PADI DI INDONESIA

Permasalahan dan tantangan dalam upaya pengamanan produksi padi/beras serta peningkatan kinerja pengolahan dan pemasaran padi/beras dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat semakin berat dan kompleks. Permasalahan dimaksud antara lain: (a) disparitas produksi dan konsumsi padi yang cukup besar dan memiliki sebaran cukup luas, (b) skala usaha tani yang relatif sempit (petani gurem) serta terpecah sehingga mengakibatkan sulit dan tidak efisien dalam penanganan penyediaan sarana produksi, pengolahan dan pemasarannya, (c) tingkat kehilangan hasil yang masih cukup tinggi yaitu sekitar 20 % terutama kehilangan hasil pada tahap panen dan perontokan, (d) kualitas gabah dan beras yang diproduksi petani dan diolah pengusaha penggilingan padi masih relatif rendah terutama berkaitan dengan fisik, rasa, penampakan dan kemasan, (e) masih rendahnya tingkat rendemen dan kualitas beras yang diakibatkan oleh kondisi alat/mesin pengolahan padi yang masih tradisional dan belum memenuhi standar sebagai prosessor yang baik, (f) lemahnya permodalan dan kelembagaan di tingkat petani mengakibatkan posisi tawar petani menjadi lemah, (g) masih belum efisiennya biaya pengolahan dan pemasaran padi/beras sehingga menurunkan daya saing dan (h) minimnya ketersediaan fasilitas pasca panen terutama *dryer* (di Thailand +/- 90 persen menggunakan *dryer* sedangkan di Indonesia sebaliknya) dan *power thresher* (berkembang hanya di daerah-daerah yang benar-benar tidak tersedia lagi tenaga perontok padi).

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, ada tiga masalah utama dalam konteks peningkatan kuantitas dan kualitas produksi padi yang dibahas dalam makalah ini, yaitu:

2.1: Produksi vs Konsumsi

Permasalahan produksi pangan terutama beras didalam negeri menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan produksi pangan yang dicirikan oleh adanya ketimpangan antar tempat dan waktu serta pengelolaannya. Dalam hal pengelolaan, produksi pangan dihasilkan oleh jutaan petani dengan luas lahan pemilikan sempit (kurang 0,5 ha) yang dikelola secara tradisional. Dilihat antar tempat, ternyata produksi tidak tersebar secara merata diseluruh wilayah Indone-

sia. Pada tahun 2006 menurut BPS (Aram II), diperkirakan produksi padi mencapai 54,7 juta ton dimana 54,8% dihasilkan di Pulau Jawa 22,7 % di Pulau Sumatera, dan sisanya di Pulau-pulau lainnya. Demikian pula apabila dilihat dari produksi antar waktu, bahwa 60 % produksi beras dihasilkan pada periode Januari - Mei, 30% pada periode Juni - Agustus dan 10% pada periode September - Desember. Sedangkan tingkat konsumsi 80% penduduk mengkonsumsi beras dan 20% masih dalam kategori konsumsi antara.

Sebaliknya dari sisi permintaan/konsumsi bahwa permintaan beras menyebar diseluruh wilayah Indonesia dan sepanjang waktu. Untuk menjembatani antara karakteristik produksi dengan permintaan diperlukan prasarana dan sarana pemasaran, seperti angkutan dan pergudangan. Prasarana dan sarana pemasaran tersebut sangat penting untuk menunjang tersedianya pangan (beras) yang cukup dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

2.2. Kehilangan Kuantitas dan Kualitas Padi

Penanganan panen dan pasca panen mempunyai peran yang strategis dalam upaya penyediaan beras karena dapat menekan kehilangan hasil sekaligus memperbaiki kualitas hasil produksi padi. Sampai saat ini, penanganan panen dan pasca panen (pengeringan) sebagian besar masih dilaksanakan oleh petani secara individu atau buruh tani walaupun telah dilakukan upaya-upaya agar penanganan panen dan pasca panen juga ditangani oleh kelompok penjual jasa. Oleh karena itu dalam perbaikan penanganan pasca panen tidak hanya pada penyediaan dan penerapan teknologinya, melainkan juga diperlukan kebijakan pengaturan, penyediaan sarana dan prasarana, rangsangan yang menarik, serta manajemen yang tepat.

Penanganan panen yang dilakukan petani cukup beragam, namun pada umumnya dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu sistem keroyokan, sistem ceblokan dan sistem beregu. Tingkat kehilangan hasil terkecil diperoleh dari sistem panen beregu sebesar 5,9%, menyusul sistem ceblokan 13,1% dan kroyokan sebesar 18,9% (Deptan, 2004).

Tahap perontokan merupakan tahapan yang tingkat kehilangan hasilnya cukup besar. Cara perontokan dengan menggunakan power tresher menunjukkan tingkat kehilangan hasil yang paling kecil yaitu antara 0,34% – 1,54% tergantung jenis power tresher yang digunakan. Sedangkan tingkat kehilangan hasil yang paling tinggi terjadi pada cara perontokan dengan banting tanpa tirai berkisar antara 6,4% - 12,3%. Meskipun cara perontokan dengan menggunakan power tresher melalui unit pelayanan jasa alsin (UPJA) telah diupayakan untuk dimasyarakatkan, namun pengembangannya di masyarakat masih belum seperti yang diharapkan.

Hal ini sangat terkait dengan aspek teknis, kalkulasi bisnis, dan kondisi sosial budaya yang masih kental berlaku di lingkungan masyarakat tani.

Kegiatan pengeringan merupakan salah satu kegiatan yang terpenting dalam upaya mempertahankan mutu atau kualitas gabah dan beras. Kadar air gabah yang baru dipanen berkisar antara 20% sampai 25%, bahkan pada musim hujan sampai 40% sehingga perlu diturunkan dengan cara pengeringan sampai mencapai kadar air maksimum 14%. Tujuan pengeringan adalah agar gabah tidak mudah rusak sewaktu disimpan, rendemen giling dan mutu tetap baik. Saat ini, petani dan bahkan penggilingan padi umumnya masih melakukan kegiatan penegeringan dengan memanfaatkan panas sinar matahari dan masih sangat sedikit yang menggunakan mesin pengering (*dryer*). Penggunaan *dryer* sangat efektif pada musim hujan yang biasanya bersamaan dengan musim panen. Akan tetapi pada saat musim kemarau atau pada saat tidak musim panen, peralatan tersebut tidak digunakan sehingga keberadaannya kurang efektif dan efisien. Kondisi tersebut menyebabkan *dryer* tidak berkembang. Akibatnya, mutu gabah khususnya yang berkaitan dengan kadar air selalu menjadi masalah di lapangan sehingga menyebabkan rendahnya harga jual gabah di tingkat petani.

Salah satu pelaku yang cukup penting di dalam sistem agribisnis perberasan adalah penggilingan padi. Usaha penggilingan padi sebagai mata rantai usaha pengolahan gabah menjadi beras dan piranti suplai beras dalam perekonomian masyarakat Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam penyediaan beras nasional baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Dari segi peningkatan kuantitas, penggilingan padi dapat berperan melalui upaya peningkatan rendemen beras. Apabila rendemen beras dapat ditingkatkan sebesar 2% saja (dari 63% menjadi 65%) dalam proses penggilingan gabah menjadi beras, maka kontribusi penggilingan padi akan dapat menambah penyediaan beras nasional sebesar 1 juta ton lebih (setara dengan Rp 2,7 triliun) dari produksi gabah yang dihasilkan petani sebanyak 54 juta ton GKG. Sedangkan dilihat dari segi peningkatan kualitas, perlu dilakukan upaya menekan jumlah beras pecah yang diperkirakan masih cukup tinggi (20 – 30%) dengan cara perbaikan penanganan pengeringan gabah kering panen menjadi gabah kering giling.

2.3. Kondisi dan Permasalahan Petani

Petani sebagai pelaku sektor pertanian memiliki berbagai masalah di dalam melaksanakan usaha taninya. Secara umum, masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (a) masalah sumberdaya manusia, (b) masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, (c) masalah modal usaha tani dan (d) pemasaran hasil usaha tani.

a. Masalah Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data BPS, petani komoditi padi pada tahun 2003 jumlah rumah tangga petani di Indonesia berjumlah 25,4 juta RT, dimana separuh dari jumlah tersebut adalah petani gurem (di bawah 0,5 ha). Sebagian besar petani di Indonesia tergolong lanjut usia (lansia), sedangkan keturunan petani yang masih muda lebih senang bekerja di sektor industri di perkotaan. Sebagian besar petani di dalam mengembangkan usaha taninya dengan cara melihat petani lain yang telah berhasil. Mereka sangat hati-hati di dalam menerapkan inovasi baru karena mereka sangat takut dengan resiko gagal panen. Tanpa ada contoh yang telah berhasil petani sangat rentan untuk merubah usaha taninya.

b. Masalah Ilmu Pengetahuan dan teknologi

Sebagian besar petani masih pendidikan Sekolah Dasar dan hanya sebagian kecil berpendidikan lanjutan. Pada umumnya ketrampilan bercocok tanam padi mereka peroleh dari orang tuanya serta pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari usaha taninya. Didalam mengolah sawahnya mereka menggunakan teknologi sederhana kecuali pengolahan tanah yang telah menggunakan traktor atau hewan penarik bajak (kerbau). Penggunaan benih unggul terkadang di lakukan tidak setiap turun tanam tetapi terkadang mereka menangkan benih sendiri untuk pertanaman berikutnya. Pengetahuan tentang penggunaan pupuk yang berimbang masih sangat terbatas sehingga pertumbuhan tanaman padinya sering tidak optimal.

c. Masalah Modal Usaha Tani

Masalah keterbatasan modal usaha tani merupakan masalah yang mendasar bagi petani. Sebagian besar petani memperoleh modal usaha dari kekayaan keluarga atau meminjam dari pengusaha yang ada di desanya. Sering petani memerlukan sarana produksi berupa pupuk, benih, alsintan, obat-obatan namun karena keterbatasan modal usaha menyebabkan pengadaan sarana ini dilakukan secara seadanya. Meskipun Pemerintah telah menyediakan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk pengadaan sarana produksi, namun karena petani belum terbiasa dengan dunia perbankan sehingga fasilitas ini sulit petani manfaatkan.

d. Masalah Pemasaran Usaha Tani.

Proses produksi tanaman padi biasanya dilakukan pada hamparan sawah yang luas dengan sumber air yang sama. Proses penanaman umumnya dilakukan secara serentak sehingga panenannya pun serentak. Dengan kondisi ini menyebabkan suplai gabah meningkat pada puncak panen sedangkan penawaran terbatas serta petani tidak memiliki sarana penjemuran. Petani terkadang tidak memiliki pilihan untuk menjual gabahnya dengan harga yang layak atau harga

yang lebih baik. Petani juga sebagian besar tidak mengetahui unit-unit pembelian gabah yang harga dan pasarnya dijamin oleh Pemerintah (Bulog dan LUEP). Kondisi ini biasanya menyebabkan harga gabah petani menjadi turun terlebih lagi pada saat tersebut turun hujan.

3. KEMITRAAN DALAM PROSES PRODUKSI PADI

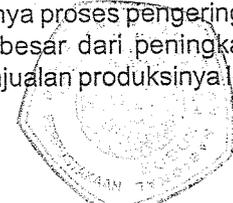
Proses produksi padi di Indonesia telah dilakukan sejak dahulu kala, namun di sadari bahwasanya produktifitas, kuantitas dan kualitas masih jauh dari harapan. Salah satu faktor yang dianggap mempunyai peranan adalah tidak terjadi integrasi diantara subsistem di bidang agribisnis padi. Pada bab ini akan dibahas Integrasi dalam Sistem Produksi Padi dan cara melakukan integrasi melalui kemitraan. Sukses tidaknya kemitraan sangat tergantung sejauh mana etika bisnis yang dilakukan oleh para pelaku kemitraan.

3.1. Integrasi Dalam Sistem Produksi Padi

Fungsi-fungsi agribisnis padi terdiri atas kegiatan penyediaan sarana produksi (benih, pupuk, alat dan mesin pertanian), kegiatan produksi primer (olah tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan), kegiatan pengolahan (agro industri), serta kegiatan pemasaran. Fungsi-fungsi tersebut kemudian disusun menjadi suatu sistem, dimana fungsi-fungsi diatas menjadi subsitem dari sistem agribisnis.

Subsistem-subsistem agribisnis padi sudah dikenal sejak manusia mengenal budidaya tanaman padi, namun berjalan secara sendiri-sendiri serta belum menggunakan teknologi dan manajemen yang baik dan tepat. Untuk mendapatkan hasil kuantitas dan kualitas yang efisien dan efektif, manusia telah mengusahakan untuk mengintegrasikan satu sama lain menjadi suatu sistem agribisnis terpadu dan selaras dengan semua subsistem yg ada didalamnya. Tanpa adanya keterpaduan dan keselarasan maka usaha tersebut tidak akan menghasilkan suatu yang optimal. Karena agribisnis mempunyai kecenderungan menjadi usaha dengan orientasi bisnis atau keuntungan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Sebagai contoh sering petani padi mengalami kekecewaan dimana ia telah berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi padinya dengan cara penerapan teknologi penggunaan benih berlabel dengan pupuk berimbang sehingga produksi petani meningkat dengan kualitas yang baik. Namun dengan tidak tersedianya sarana pengolahan yang memadai (mesin pengering) menyebabkan produksi tersebut mengalami kerusakan sebagai akibat terlambatnya proses pengeringan. Harapan petani untuk memperoleh keuntungan yang besar dari peningkatan produksinya akan gagal karena pendapatan dari hasil penjualan produksinya lebih



kecil dari harapan. Demikian pula sebaliknya, sarana pengolahan yang baik telah tersedia (mesin pengering dan penggilingan padi modern) serta pasar yang telah menjanjikan, namun tanpa memperhatikan penyediaan sarana produksi yang baik dengan budidaya yang tepat sangat sulit diperoleh bahan baku yang kuantitas dan kualitas sesuai yang diharapkan oleh pasar.

Selain itu sistem agribisnis padi, juga membutuhkan subsistem lembaga penunjang, yaitu: lembaga pertanahan, pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta perhubungan. Lembaga ini juga sangat besar peranannya di dalam meningkatkan kinerja sistem agribisnis padi. Lembaga ini sangat berperanan dalam peningkatan kinerja dan usaha petani karena lembaga pertanahan memberikan kepastian status tanah yang digarap petani, lembaga pembiayaan dapat menyediakan dana untuk pengadaan sarana produksi, lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menyediakan tenaga-tenaga profesional sedangkan lembaga penelitian memberikan sumbangan berupa teknologi dan informasi.

3.2. Integrasi Dalam Kemitraan

Salah satu cara untuk mengintegrasikan subsistem-subsistem dalam sistem agribisnis padi adalah dengan mengembangkan kemitraan diantara para pelaku di bidang produksi padi. Yang dimaksud dengan kemitraan disini adalah hubungan kerjasama antara para pihak dalam kesetaraan dan keterbukaan dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kerjasama ini merupakan suatu kesepakatan semua pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak atau perjanjian) maupun secara lisan. Dalam hubungan kemitraan, masing-masing pihak menggunakan sumber daya yang mereka kuasai.

Namun demikian, sebagus apapun bentuk pola kemitraan tanpa adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis maka kemitraan akan gagal. Hal ini penting mengingat banyak kegagalan dalam kemitraan selama ini yang terjadi disebabkan karena lemahnya etika bisnis yang dibangun.

Pada dasarnya hubungan kemitraan dilakukan untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh semua pihak yang bermitra, karena hubungan kerjasama akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh pihak inti dimana ia harus mengandalkan pengadaan bahan baku sepenuhnya dari pasar terbuka. Perusahaan inti juga akan memperoleh keuntungan lain karena mereka tidak harus menanamkan investasi atas tanah dan mengelola pertanian yang sangat luas. Bagi pihak petani sebagai plasma dalam kerjasama ini akan mengatasi persoalan-persoalan yang umum mereka hadapi baik di dalam penyediaan sarana produksi maupun pemasaran hasil usaha tani yang tidak pasti. Dengan adanya pola kemitraan ini

akan mengurangi resiko ketidak pastian dari pihak inti maupun pihak plasma.

Beberapa prinsip yang perlu dipegang oleh pelaku kemitraan adalah : Mempunyai tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling mempercayai, bersifat terbuka, mempunyai hubungan jangka panjang, terus menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga dan biaya.

Untuk mengintegrasikan sistem agribisnis padi dalam pola kemitraan diperlukan adanya lembaga yang menjadi inisiator dan motivator yang diperankan sebagai inti sehingga semua subsistem yang terkait bisa terintegrasi menjadi suatu sistem.

3.3. Etika Dalam Kemitraan

Pola kemitraan di bidang produksi padi telah dilaksanakan oleh Perum Bulog bersama mitranya di beberapa daerah dimana petani sebagai plasmanya. Di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan kemitraan ini berjalan dengan baik. Berhasilnya pola kemitraan di Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh adanya intervensi dari Pemerintah Daerah tingkat II khususnya Bupati. Namun keberhasilan ini tidak berjalan di daerah lain seperti di kabupaten Sidrap, walaupun polanya relatif sama. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya di daerah lain karena tidak adanya etika yang baik dari para pelaku kemitraan.

Menurut John L. Mariotti dalam bukunya "The Power of Partnership (1993)" yang dikutip oleh Mohammad Jafar Hafsa dalam bukunya "Kemitraan Usaha (2000)" yang mengemukakan enam dasar etika berbisnis dimana empat yang pertama merupakan hubungan interaksi manusia dan dua berikutnya merupakan perspektif bisnis. Keenam dasar etika bisnis tersebut adalah:

a. Karakter dan Integritas

Dalam kemitraan diperlukan pelaku-pelaku yang berkarakter kuat tidak mudah putus asa. Selain itu juga diperlukan integritas yang tinggi dimana pelaku kemitraan mempunyai sikap jujur dan tulus hati

b. Kepercayaan

Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau lebih dimulai atas dasar sikap saling mempercayai. Kegagalan dalam membangun kemitraan biasanya dimulai dari sikap yang saling mencurigai dan akhirnya saling tidak percaya.

c. Komunikasi yang terbuka

Pertukaran informasi secara bebas oleh pelaku yang bermitra akan

melahirkan suatu ide atau gagasan cemerlang yang akan memicu kreativitas sehingga berdampak pada kegiatan atau usaha yang akan dilakukan.

d. **Adil**

Secara harfiah adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Kemitraan yang dilandasi sikap adil menunjukkan adanya pengorbanan dari pihak yang bermitra untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pengorbanan yang diberikan oleh satu pihak tidak berarti merupakan suatu kerugian melainkan suatu tindakan yang telah diperhitungkan demi meraih suatu nilai tambah yang maksimal.

e. **Keinginan Pribadi dari Pihak yang Bermitra**

Sebelum dua pihak memulai untuk bekerjasama dalam kemitraan maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini bisa dalam wujud ekonomi (peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar) dan non ekonomi (peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu).

f. **Keseimbangan antara Insentif dan Resiko**

Kemitraan merupakan perpaduan antara resiko yang diberikan dengan hasil atau insentif yang diterima. Keseimbangan ini akan terus menerus mewarnai perjalanan kemitraan. Dengan kata lain bagi pihak-pihak yang bermitra harus ada keinginan untuk memikul beban resiko yang dihadapi bersama selain menikmati keuntungan secara bersama.

4. KEMITRAAN BERBASIS PENGGILINGAN PADI

Fokus utama yang akan diberdayakan adalah petani sebagai produsen padi. Namun demikian maju mundurnya kinerja petani sangat tergantung dari instansi lainnya antara lain Penggilingan Padi. Pada pelaksanaan kemitraan agribisnis padi, penggilingan padi bisa dijadikan sebagai simpul dan motor penggerak sehingga pada bagian ini akan dijelaskan Pengertian Penggilingan Padi dan Kemitraan berbasis Penggilingan Padi.

4.1. Pengertian Penggilingan Padi

Yang dimaksud dengan penggilingan padi adalah rangkaian alat dan mesin yang berfungsi melakukan proses pengolahan gabah kering giling (GKG) sampai menjadi

beras putih siap konsumsi. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi jumlah pengusaha penggilingan padi di Indonesia sebanyak 110.611 unit yang kapasitas dan kualitas hasil gilingnya sangat bervariasi. Untuk mengelompokkan pengusaha penggilingan padi berdasarkan sarana pasca panen yang dimiliki, dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu Penggilingan Padi Terpadu (PPT), Penggilingan Padi Besar (PPB), Penggilingan Padi Kecil (PPK), Penggilingan Padi Sederhana (PPS). Perincian alat dan mesin yang dimiliki penggilingan padi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sedangkan berdasarkan status hukumnya penggilingan padi dapat dikelompokkan menjadi perusahaan pribadi (CV) atau perseroan Terbatas (Mitra Kerja Bulog), Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Unit Pengolahan Gabah dan Beras Bulog (UPGB Bulog).

Tipe	NAMA	PENGERINGAN	PENGGILINGAN	PENYIMPANAN
A	PPT	Pengering Mekanis (> 50 ton/cycle)	Rice Milling Plant (> 10 ton/jam)	Silo penyimpanan (> 3.000 ton)
B	PPB	Lantai Jemur dan (> 15 ton/jam) Pengering Mekanis (> 10 ton/jam)	Rice Milling Unit (3 – 10 ton/jam)	Gudang Permanen (> 1.000 ton)
C	PPK	Lantai Jemur (> 10 ton/hari)	Rice Milling Unit (1 - 3 ton/jam)	Gdg semi Permanen (> 1.000 ton)
D	PPS	Lantai Jemur (> 5 ton/hari)	Rice Milling Unit (0,5 - 1 ton/jam)	Gudang Sederhana (> 1.000 ton)

4.2. Kemitraan Berbasis Penggilingan Padi

Saat ini Perusahaan penggilingan padi lebih banyak berfungsi sebagai tempat pengolahan padi milik petani yang selanjutnya didistribusikan ke konsumen sehingga menjadi titik sentral dari suatu kawasan pertanian. Penggilingan Padi ini ikut menentukan jumlah ketersediaan pangan, mutu pangan, tingkat harga pangan, pendapatan petani serta lapangan pekerjaan di pedesaan. Penggilingan Padi menjadi titik simpul industri pedesaan sehingga memainkan peran yang sangat besar terhadap perekonomian pedesaan.

Di masa yang akan datang, penggilingan padi juga diharapkan sebagai tempat pengecer sarana input berupa benih, pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian. Adapun pertimbangan menunjuk Penggilingan Padi sebagai pengecer sarana input adalah: (a) berada di tengah-tengah kawasan pertanian dan pedesaan, (b) memiliki sarana gudang sebagai tempat penyimpanan sementara, (c) memiliki SDM yang dapat mengadministrasikan kegiatan penyaluran sarana input, (d) memiliki hubungan emosional dengan petani karena mereka menampung hasil produksi petani dan (e) dengan petani menggunakan sarana input yang tepat akan berdampak positif terhadap kuantitas dan kualitas gabah yang akan di beli penggilingan padi.

Dengan cara ini diharapkan petani lebih mudah memperoleh sarana input tersebut dengan cara lima tepat, yaitu: (a) tepat jumlah, (b) tepat waktu, (c) tepat mutu, (d) tepat harga dan (5) tepat lokasi. Hal ini dimungkinkan dengan cara membentuk Kemitraan antara petani, Perum Bulog, Pabrikan Benih, Pupuk dan alsintan, Perbankan, asuransi dan sebagainya.

Pengusaha penggilingan padi tidak secara otomatis akan ditunjuk sebagai bagian dari kemitraan, tetapi harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: (a) memiliki legalitas badan hukum sebagai perusahaan, (b) memiliki sarana processing yang memadai (PPB atau PPT), (c) bersedia mematuhi ketentuan dalam kemitraan termasuk kode etika bisnis, (d) mempunyai SDM yang kompeten di bidang penlohan dan administrasi, (e) memiliki kelompok tani binaan yang anggotanya berada dalam satu kawasan, (f) berdomisili pada wilayah kabupaten/ kota yang sama dengan kelompok tani binaannya dan (g) memiliki rekening giro di Bank Pelaksana.

5. PERANAN PERUM BULOG DALAM KEMITRAAN

Pola kemitraan telah banyak diterapkan dalam bidang pertanian dengan berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi. Khusus kemitraan di bidang agribisnis padi yang dibahas pada makalah ini, Perum Bulog diharapkan sebagai inisiator dan promotor sehingga lembaga-lembaga yang terkait bisa terlibat di dalamnya. Untuk itu pada bab ini akan dibahas tentang peran Perum Bulog sebagai inti dalam kemitraan, Pelaku manajemen Logistik, Mediator Kredit Ketahanan Pangan, Penjamin Harga dan Pasar hasil produksi petani.

5.1. Sebagai Inti Dalam Kemitraan

Perum Bulog adalah salah satu BUMN yang ditugaskan untuk melakukan pembelian hasil produksi petani padi, menjaga cadangan pberas nasional serta menyalurkan beras bagi keluarga miskin. Tugas publik yang dilakukan diatas, tidak lepas dari peran logistic yang diembannya lebih dari 30 tahun. Perum Bulog saat ini memiliki infrastruktur berupa kantor pusat, kantor divre di 26 propinsi, kantor subdivre di 102 Kabupaten/kota, 1500 lokasi gudang dengan kapasitas sebesar 4.500.000 ton yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini Perum Bulog juga memiliki sarana Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) sebanyak 97 unit dan 57 Drying Centre. Hampir seluruh sarana tersebut dihubungkan dengan jaringan IT (information technology) sehingga data dan informasi dapat tersaji secara cepat dan akurat.

Sarana dan fasilitas inilah yang dapat dimanfaatkan untuk saling bersinergi antar para pelaku kemitraan (produsen benih, pupuk, obat-obatan dan alsintan) sehingga tujuan untuk mengembangkan produksi di Indonesia dapat tercapai. Dengan potensi ini, tidak salah apabila Perum Bulog ditunjuk sebagai inti dalam proses kemitraan sehingga koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi para pelaku kemitraan diharapkan dapat terwujud.

Peran Perum Bulog yang diharapkan dalam kemitraan adalah: (a) sebagai distributor sarana input (benih, pupuk, obat-obatan, alsintan) dimana penggilingan berfungsi sebagai penyalur ke petani peserta kemitraan dan (b) sebagai penjamin harga dan pasar bagi hasil produksi petani. minimal sesuai jumlah kredit ketahanan pangan yang digunakan petani. Dengan peran ini diharapkan petani akan memperoleh sarana input secara enam tepat dan mendapat jaminan harga dan pasar bagi hasil produksinya.

5.2. Pelaku Manajemen Logistik

Untuk mengintegrasikan subsistem-subsistem agribisnis padi dibutuhkan adanya sarana logistik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan dengan biaya seefisien mungkin. Seperti yang diketahui bahwasanya tujuan logistik di sistem agribisnis adalah menyampaikan sarana produksi dalam jumlah yang tepat pada waktu dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi dimana ia dibutuhkan dan dengan total biaya yang rendah. Demikian juga hasil produksi petani membutuhkan sarana logistik ke penggilingan padi agar rantai tataniaga yang terjadi saat ini dapat dikurangi.

Sebagai contoh pupuk yang dibutuhkan petani tersedia di tempat-tempat tertentu baik itu di lini II atau di lini III (Kota Kabupaten), sedangkan petani tersebar secara tidak merata di wilayah-wilayah pertanian. Dengan demikian diperlukan adanya sarana angkutan yang menghubungkan keduanya dengan prinsip enam tepat (Jumlah, Tempat, Jenis, Harga, Mutu, Waktu). Dengan adanya kemitraan diantara pelaku agribisnis padi maka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari logistik ini dapat dilakukan. Perencanaan dapat dilakukan oleh Subdivre berdasarkan database yang datanya merupakan kumpulan dari RDKK petani. Print out database yang ada di Subdivre dapat memberikan informasi pupuk yang akan dikirim ke petani, dari dan ke mana dilakukan sehingga memudahkan pelaksanaan dan pengawasan pengangkutan tersebut. Adapun pelaksanaan angkutan dapat dilakukan oleh penggilingan padi atau pengusaha pengangkut dengan cara outsourcing.

5.3. Saluran Kredit Ketahanan Pangan

Kendala Perbankan di dalam menyalurkan Kredit modal usaha kepada petani antara lain: (a) jumlah petani yang membutuhkan KKP berjumlah banyak dengan kebutuhan kredit relatif kecil (maks 2,5 juta rupiah), (b) tingkat pengetahuan petani sangat terbatas dan belum terbiasa dengan mekanisme perbankan, (c) tidak memiliki agunan sebagai jaminan dari kredit petani dan (d) lokasinya di perdesaan dan jaringan infrastrukturnya sangat terbatas dan sebagainya.

Sehubungan hal tersebut Pemerintah telah menyediakan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) melalui penyediaan kredit investasi dan atau modal kerja dengan tingkat bunga yang terjangkau dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional dan sekaligus peningkatan pendapatan petani, peternak dan nelayan. Yang dimaksud dengan tingkat bunga yang terjangkau adalah pemberian subsidi bunga sebesar 10 % bagi tanaman padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar.

Persyaratan petani penerima KKP adalah: (a) petani penggarap dan atau petani pemilik penggarap dengan luas garapan maksimal dua Ha, (b) petani peserta berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah dan (c) bersedia mengikuti petunjuk dari PPL atau Dinas Teknis setempat serta mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP.

Meskipun kemudahan-kemudahan KKP telah diberikan Pemerintah, namun petani masih sulit untuk memperolehnya. Hal ini disebabkan karena akses petani ke Bank relatif sulit sehingga tanpa adanya mediator maka KKP sulit dimanfaatkan oleh petani. Pada kesempatan ini Perum Bulog sebagai inti kemitraan akan memposisikan dirinya sebagai mediator penyaluran KKP.

Untuk memperoleh sarana input pertanian dengan menggunakan fasilitas KKP, petani diharuskan mengisi formulir kebutuhan yang selanjutnya ditabulasi menjadi Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dengan dasar RDKK tersebut Subdivre Bulog mengumpulkan dari masing-masing kelompok tani melalui mitra kerja penggilingan padi untuk diajukan ke Bank pelaksana. Setelah Bank pelaksana mempelajari dan menyetujui, selanjutnya di jadikan jaminan untuk pengadaan sarana input kepada produsen sarana input. Pelunasan kredit beserta bunganya akan dilakukan petani berupa penyerahan sebagian hasil produksi padinya kepada Subdivre Bulog melalui mitra kerjanya.

5.4. Penjamin Harga Dan Pasar

Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan untuk peningkatan ketahanan pangan serta pengembangan ekonomi pedesaan, setiap tahun Pemerintah menginstruksikan kepada beberapa Menteri dan kepala lembaga. Salah satu diktum dalam Instruksi tersebut adalah memberikan jaminan Harga dan Pasar bagi hasil produksi petani. Pada tahun 2006, instruksi berupa penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditi gabah kering giling (GKG) dan beras dengan kualitas tertentu (Modifikasi SNI IV). Sebagai pelaksana kebijakan ini telah ditunjuk Perum Bulog bersama Badan Usaha di bidang pangan.

Untuk melaksanakan instruksi tersebut Perum Bulog memiliki infrastruktur berupa Gudang, Pengeringan dan Penggilingan Padi (UPGB), sarana perkantoran dan Sumber Daya Manusia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun jumlah ini bila dibanding dengan jumlah petani yang akan dilayani masih kurang. Untuk itu Perum Bulog telah menunjuk beberapa penggilingan padi (swasta, koperasi, BUMP) untuk bermitra dalam pengadaan gabah dan beras produksi petani. Jumlah mitra kerja Perum Bulog berkisar 4500 sampai 5000 unit yang tersebar di kantong-kantong produksi padi di wilayah Indonesia.

Dari pengalaman selama ini, Perum Bulog telah melakukan pengadaan dalam negeri berupa gabah dan beras diantara 2 juta sampai dengan 2,5 juta ton setara beras. Jumlah relatif masih kecil hanya sekitar 7 persen dari total produksi nasional sebanyak 54 juta ton Gabah.

Kendala yang Perum Bulog alami adalah puncak pengadaan dilakukan bertepatan dengan musim hujan sehingga kualitas gabah maupun beras yang diadakan relatif kurang baik. Selain itu faktor kualitas benih, ketepatan pemupukan, pemeliharaan tanaman, perlakuan paca panen kurang memadai juga memicu jeleknya kualitas beras yang diadakan oleh Perum Bulog.

6. OPERASIONALISASI KEMITRAAN AGRIBISNIS PADI

Untuk mewujudkan kemitraan agribisnis padi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: petani dan mitra kerja sebagai obyek utama dalam kegiatan kemitraan. Selanjutnya perlu juga diketahui bagaimana pola kemitraan itu sendiri serta perlunya database untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan pola kemitraan agribisnis padi. Pada bab ini akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

6.1. Seleksi Petani Dan Mitra Kerja

Untuk mendapatkan sasaran yang tepat dalam kemitraan maka perlu diadakan seleksi bagi para pelaku kemitraan terutama petani sebagai objeknya. Seleksi ini bertujuan agar yang terpilih adalah benar-benar petani. Kita tidak mengharapkan adanya pemanfaatan fasilitas dari Pemerintah kepada orang-orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Dengan demikian petani terpilih adalah : Petani penggarap lahan sendiri atau penggarap lahan orang lain, berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah menikah. Memiliki lahan garapan maksimal dua hektar. Sebagai bukti bahwa petani tersebut adalah peserta kemitraan maka ia akan diberikan kartu yang disebut " KARTU TANI ".

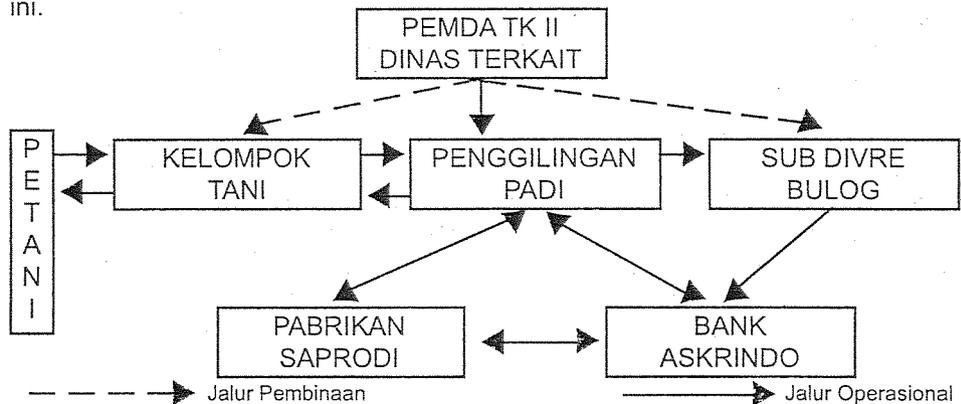
Sedangkan persyaratan bagi kelompok tani adalah sebagai berikut: (a) telah terdaftar pada Dinas Teknis setempat, (b) mempunyai anggota petani sebagai petani binaannya, (c) mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif minimal ketua dan bendahara, (d) bersedia mengusahakan untuk mengadakan tabungan kelompok tani dan memiliki rekening di bank pelaksana kemitraan, (e) mempunyai pembukuan sederhana dan (f) bersedia mengikuti persyaratan yang ditentukan dalam pola kemitraan.

Persyaratan sebagai mitra Kerja dalam Kemitraan adalah: (a) memiliki Badan Hukum yang dibuktikan dengan dokumen SIUP, SIPPP, HO, (b) bersedia mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan tentang Kemitraan dan pengadaan Perum Bulog, (c) memiliki sarana dan prasarana pengolahan padi yang dapat menghasilkan produk sesuai ketentuan, (d) mempunyai pengurus yang aktif dan mengerti tentang administrasi dan pembukuan, (e) memiliki kelompok tani binaan yang anggotanya berada dalam satu hamparan atau kawasan, (f) menjadi nasabah yang baik dari Bank Pelaksana dan (g) ketentuan lain berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.

6.2. Pola Kemitraan Agribisnis Padi

Pelaku dalam pola kemitraan agribisnis padi adalah Petani dan kelompok tani, Perum Bulog, Produsen Pupuk (Pustri, PKT, Petro Kimia, Pupuk Kujang, AAF), Produsen Benih (Sang Hyang Sri, Pertani), Perbankan (Bukopin, BRI, Mandiri, BPD), Asuransi (Askrindo), serta Mitra Kerja Perum Bulog (Pengusaha Penggilingan Padi, Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Milik Petani). Pola kemitraan ini diatur dalam bentuk Kesepahaman Bersama dari semua pihak pelaku kemitraan. Kesepahaman ini berisi maksud dan tujuan kemitraan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Selain para pelaku kemitraan juga instansi pembina ikut terlibat dalam kemitraan ini sehingga bisa memberikan masukan, mengawasi serta penengah apabila terjadi perselisihan diantara para pelaku kemitraan. Yang dimaksud instansi pembina adalah Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Kantor Menteri Negara BUMN serta Kepala wilayah masing-masing daerah ke mitraan (Gubernur dan Bupati). Mekanisme kerja pola kemitraan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Keuntungan yang diperoleh petani adalah: (a) tersedianya sarana produksi dengan cara enam tepat (jumlah, tempat, jenis, harga, mutu, waktu) dengan menggunakan Kredit Ketahanan Pangan, (b) terjaminnya harga dan pasar bagi hasil produksi petani dan (c) petani hanya berhubungan dengan satu lembaga saja (Perum Bulog).

6.2. Database Pelaku Kemitraan

Kegagalan dalam kemitraan khususnya di bidang pertanian tanaman pangan banyak disebabkan karena jeleknya pengorganisasian dan administrasi kemitraan. Untuk mengurangi resiko kegagalan ini maka Perum Bulog akan membangun database yang terkait dengan kemitraan. Database ini berisi data tentang seluruh pelaku kemitraan (Bulog, Pabrik Pupuk, Pabrik Benih, Pabrik Alsintan, Obat-obatan, Perbankan) dan aktifitas kemitraan (penyaluran sarana produksi dengan menggunakan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan, penjualan dan pemasaran hasil produksi petani dan pelunasan kredit Ketahanan Pangan, dan lainnya), serta juga dapat digunakan sebagai sumber informasi produktifitas sawah petani di suatu Kabupaten.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya database kemitraan sebagai berikut: (a) mempermudah identifikasi petani peserta kemitraan dan pelaku kemitraan (b) mempermudah dan mempercepat penyusunan RDKK (c) mempermudah dan mempercepat penyaluran dan pengembalian Kredit Ketahanan Pangan, (d) Mempermudah monitoring dan evaluasi pengadaan sarana input pertanian khususnya yang bersubsidi, (e) mempermudah monitoring dan evaluasi penjualan hasil produksi petani baik yang dijual ke Bulog maupun ke pasar umum dan (f) mempermudah dan mempercepat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan petani dan sebagainya.

Semua petani peserta kemitraan akan memperoleh "KARTU" yang disebut kartu tani yang menjadi identitasnya. Kartu ini dapat digunakan pada saat membutuhkan sarana input, kredit ketahanan pangan maupun pada saat menyalurkan hasil produksinya ke Perum Bulog. Kartu ini dimasa yang akan datang bisa dikembangkan bukan saja untuk kebutuhan komoditi padi tetapi juga komoditi pangan lainnya. Database ini diprakarsai dan akan ditempatkan di Subdivre Bulog tetapi sumber data berasal dari petani serta para pelaku kemitraan.